

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa waris di Pengadilan Agama Padang Panjang adalah karena para pihak tidak bersepakat untuk membagi harta waris, karena pihak tergugat ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya sendiri, dan tidak dilaksanakan pembagian warisan secara sukarela dengan hukum faraidh, pihak tergugat menjadikan hukum *minangkabau* sebagai alasan untuk menguasai harta tersebut, upaya penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak kunjung berhasil, harta warisan belum difaraidhkan dalam jangka waktu yang lama, banyaknya harta peninggalan pewaris yang belum terbagi, harta waris berada di tangan pihak tertentu dan beberapa pewaris hendak menjual harta peninggalan tersebut dikarenakan sangat membutuhkan uang.
2. Putusan hakim pada perkara nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP dilaksanakan dengan sukarela sesuai dengan amar putusan pengadilan. Terhadap objek sengketa waris berupa tanah (tanah) telah dilakukan balik nama turun waris, pemecahan sertifikat dan pembagian hak bersama atas nama masing-masing pihak, beberapa ahli waris telah menjual bagiannya kepada pihak ketiga.
3. Akibat hukum eksekusi putusan pengadilan adalah putusan pengadilan tersebut mengikat kedua belah pihak (pihak penggugat dan tergugat). Mengikat kedua belah pihak yang nantinya akan melakukan pembagian hak

milik atas tanah. Prosedur melakukan pembagian hak milik atas tanah yang berasal dari tanah warisan dengan alas hak putusan hakim di Badan Pertanahan Kota Padang Panjang adalah Pengurusan balik nama hak milik turun waris, pemecahan sertipikat induk, pembagian hak bersama sesuai porsi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam menjalankan pembagian harta warisan dilaksanakan secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan yang berpedoman dengan hukum *faraidh*, sebab jika masuk keranah peradilan agama, maka hakimpun akan membagi warisan berdasarkan hukum *faraidh*, selain itu akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses beracara di pengadilan.
2. Sebaiknya dalam menjalankan putusan pengadilan dilaksanakan dengan cara sukarela agar dapat mengefisienkan waktu dan mengurangi biaya dalam proses eksekusi paksa.
3. Untuk memenuhi azas sederhana dalam pendaftaran tanah sebaiknya pelaksanaan mengenai perubahan data pendaftaran tanah melalui putusan pengadilan mengenai pembagian hak bersama dalam hal pewarisan tidak perlu melakukan proses turun waris terlebih dahulu, untuk menghemat prosedural dan waktu langsung dibuatkan sertipikat hak atas tanah sesuai bagian masing-masing ahli waris, karena dalam putusan hakim khususnya putusan nomor

0236/Pdt.G/2014/PA.PP telah memutuskan sesuai bagian masing-masing yang diperoleh ahli waris.

